

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Mengacu pada data hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian yang telah tersaji dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan dari hasil temuan penelitian sebagai berikut:

1. Kebijakan Kota Tidore Kepulauan menjadikan pariwisata sebagai sektor ekonomi unggulan dan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi sebagaimana dirumuskan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025, memberikan gambaran bahwa daerah tersebut menyiapkan dirinya sebagai daerah destinasi wisata. Untuk mewujudkan konsep visi dan misi tersebut maka Kota Tidore Kepulauan harus membangun daerahnya sebagai destinasi wisata. Secara konseptual, salah satu komponen dalam perencanaan pembangunan destinasi pariwisata adalah penyiapan objek dan daya tarik wisata destinasi wisata. Oleh karena itu, Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan perencanaan pembangunan destinasi pariwisata di daerahnya dengan cara melakukan penyiapan objek dan daya tarik destinasi wisata. Upaya Kota Tidore Kepulauan dalam menyiapkan objek dan daya tarik destinasi wisata tersebut menghasilkan: pertama, teridentifikasi objek wisata yang terdapat di daerah tersebut sebanyak 88 (delapan puluh delapan) objek wisata, yang terdiri dari objek wisata bahari, alam, sejarah, seni dan budaya, agrowisata, dan kuliner. Kedua, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan melakukan analisis dan kajian untuk mengidentifikasi objek wisata unggulan

daerah yang nantinya menjadi prioritas utama untuk dikembangkan sebagai objek wisata unggulan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa, di Kota Tidore Kepulauan terdapat 20 (dua puluh) objek wisata unggulan. Namun demikian, terdapat beberapa objek wisata dan objek wisata unggulan daerah yang belum teridentifikasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Ketiga, Kota Tidore Kepulauan menyiapkan lingkungan sosial masyarakat dan alam untuk mendukung daerah tersebut sebagai destinasi pariwisata dengan cara menjaga lingkungan sosial yang aman, damai dan nyaman. Serta menjaga lingkungan alam agar tetap terlindungi. Namun ketersediaan sumberdaya manusia di sektor kepariwisataan masih sangat kurang. Keempat, menyiapkan tatalaksana pembangunan infrastruktur pendukung kepariwisataan untuk memberikan kemudahan wisatawan dalam berwisata. Namun kesiapan tatalaksana pembangunan infrastruktur pendukung tersebut masih dalam bentuk dokumen perencanaan yang belum ditetapkan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa, Kota Tidore Kepulauan dalam perencanaan pembangunan destinasi pariwisata telah berusaha menyiapkan objek dan dayatarik destinasi wisata daerahnya. Dalam proses tersebut belum dilakukan secara maksimal, dikarenakan belum semua objek wisata teridentifikasi, terdapat beberapa objek wisata yang dianggap unggul belum dikelola secara baik, dan ketersediaan sumberdaya manusia yang masih sangat kurang. Namun demikian, pada sisi kesiapan lingkungan sosial dan alam menunjukkan Kota Tidore Kepulauan telah memiliki siap menjadi daerah destinasi wisata.

2. Ketersediaan amenities atau fasilitas penunjang dan pendukung wisata berupa sarana akomodasi pariwisata seperti hotel dan penginapan, restoran dan rumah

makan, serta sarana pariwisata seperti biro perjalanan. Terkait dengan ketersediaan berbagai fasilitas amenities tersebut, menunjukkan bahwa di Kota Tidore Kepulauan masih sangat terbatas fasilitas amenities. Khusus biro perjalanan, di Kota Tidore Kepulauan belum terdapat sarana tersebut. Melihat realitas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, pada sisi kesiapan dan ketersediaan fasilitas amenities, Kota Tidore Kepulauan belum cukup siap menjadi daerah destinasi pariwisata.

3. Pembangunan pariwisata memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, yang meliputi: jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, dan rute atau jalur transportasi serta moda transportasi yang digunakan untuk mencapai objek wisata. Secara geografis Kota Tidore Kepulauan adalah daerah kepulauan, namun demikian, tidak ada daerah dan pulau di Kota Tidore Kepulauan terisolasi dari sisi transportasi, karena prasarana dan sarana transportasi telah tersedia dengan baik. Semua daerah dan pulau di Kota Tidore Kepulauan bisa dijangkau dengan berbagai model transportasi, baik laut maupun darat. Pada transportasi darat terdapat beberapa model transportasi seperti kendaraan umum mini bus, ojek dan becak bermotor (bentor). Sedangkan untuk transportasi laut, terdapat beberapa alternatif kendaraan yang dapat digunakan untuk transportasi penyeberangan antar pulau, seperti kapal feri, kapal motor, dan speedboat. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa, dalam konteks pembangunan destinasi, khususnya pada sisi transportasi Kota Tidore Kepulauan telah menyiapkan dirinya sebagai daerah destinasi pariwisata.
4. Pembangunan destinasi pariwisata diperlukan fasilitas umum pendukung yang digunakan oleh wisatawan dalam aktifitas berwisata, seperti: listrik, air bersih,

bank, telekomunikasi, rumah sakit, toko cinderamata, dan fasilitas kenyamanan lainnya. Kota Tidore Kepulauan dengan usia yang relatif muda telah berusaha menyediakan berbagai fasilitas umum dalam kerangka untuk membangun daerahnya. Penyediaan berbagai fasilitas umum tersebut dalam upaya untuk membangun seluruh sektor dan bidang pembangunan di daerah tersebut, termasuk sektor pariwisata. Namun demikian, ketersediaan berbagai fasilitas publik tersebut belum memadai dan relatif minim. Khusus fasilitas pendukung seperti mall dan toko souvenir belum ada. Melihat realitas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa untuk ketersediaan fasilitas umum pendukung destinasi pariwisata, di Kota Tidore Kepulauan masih belum memadai.

5. Keberadaan kelembagaan dalam pembangunan destinasi pariwisata sangat penting. Secara umum lembaga yang harus ada dan dilibatkan dalam pembangunan daerah adalah pemerintah daerah, pihak swasta dan pelaku usaha, dan masyarakat daerah. Dalam case pembangunan pariwisata Kota Tidore Kepulauan, pada unsur pemerintah daerah, terdapat 20 (dua puluh) instansi daerah yang mempunyai perhatian terhadap pembangunan destinasi pariwisata di daerah tersebut. Pihak swasta dan pelaku usaha, teridentifikasi pelaku usaha pariwisata yang mempunyai perhatian untuk membangun pariwisata di Kota Tidore Kepulauan, meliputi: pelakusaha akomodasi (hotel dan penginapan), restoran dan rumah makan, asosiasi transportasi (darat dan laut), usaha pengrajan atau industri rumahan (*home industry*), dan usaha perdagangan. Namun, belum ada perhatian dari lembaga swasta yang tidak terkait dengan industri pariwisata. Pada unsur masyarakat, terdapat beberapa lembaga sosial kemasyarakatan mempunyai perhatian dalam pembangunan pariwisata di daerah tersebut. Lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga

pendidikan tinggi, lembaga sudaaya masyarakat (LSM), lembaga adat berserta para pemimpin informal, dan masyarakat secara individu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada konteks kelembagaan terdapat berbagai satakeholders daerah yang terkait dengan kepariwisataan mempunyai perhatian terhadap pembangunan kepariwisataan di daerah tersebut.

6. Koordinasi dan upaya menodrong pasrtisipasi dari berbagai stakeholders daerah dalam perencanaan pembangunan daerah meruapakan bagian daris sistem perencanaan pembangunan daerah. Dalam konsep perencanaan pembangunan destinasi pariwisata, secara umum stakeholders kepariwisataan terdiri dari pemerintah, pihak swasta, pelaku usaha pariwisata, masyarakat (individu dan institusi), serta pelaku usaha terkaitlannya. Dalam case perencanaan pembangunan destinasi pariwisata Kota Tidore Kepulauan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menunjukan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak melibatkan semua stakeholders, baik di internal pemerintah maupun swasta, pelaku usaha dan mansyarakat.
7. Model perencanaan pembangunan destinasi pariwisata yang dilakukan oleh Kota Tidore Kepulauan dalam upaya untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah dengan cara: menyiapkan objek dan daya tarik destinasi wisata; menyediakan fasilitas penunjang dan pendukung wisata berupa sarana akomodari pariwisata sperti hotel dan penginapan, restoran dan rumah makan; membangun sarana dan prasarana transpotrasi; menyediakan fasilitas umum pendukung yang digunakan oleh wisatawan dalam aktifitas berwisata, seperti: listrik, air bersih, bank, telekomunikasi,

rumah sakit, dan fasilitas kenyamanan lainnya; menyiapkan kelembagaan yang terdiri atas pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat daerah; dan melakukan koordinasi dalam proses pembangunan pariwisata.

7.2. Implikasi Teoritis dan Parktis

7.2.1 Implikasi Teoritis

Pelaksanaan pembangunan daerah pada era otonomi daerah diharapkan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, kreatifitas, dan inovasi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di daerah. Dengan demikian maka akan mengembangkan fungsi dan peran lembaga sosial di daerah. Selain itu, dengan desentralisasi maka rentang kendali birokrasi pemerintah semakin pendek, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pembangunan dapat dijalankan lebih terfokus dan tepat sesuai dengan aspirasi dan perkembangan masyarakat serta dinamika daerah. Selain itu, daerah mendapat kewenangan yang luas dalam pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah secara berkeadilan.

Harapan ideal dari penyelenggaraan otonomi daerah tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Djohan (Kartodihardjo, 2004) bahwa, dengan penyelenggaraan otonomi daerah maka: Mendekatkan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintah dengan masyarakat, sehingga kebijakan yang disusun akan lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat; Mendekatkan pemerintah dengan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah dengan cepat mengetahui dan memantau perkembangan kualitas kehidupan masyarakat; Menyesuaikan kebijakan-kebijakan maupun program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat baik ekonomi, sosial, politik, budaya, spiritual maupun

faktor-faktor lokal/*indigeneous* lainnya; Menggunakan sistem nilai dan mekanisme sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat setempat sebagai rujukan untuk sistem dan mekanisme birokrasi pemerintahan daerah; Mengoptimalkan upaya pengembangan produktivitas sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif atau dominan di kabupaten/kota/wilayah untuk dapat dikembangkan secara maksimal bersama-sama pemerintah daerah; Menciptakan sistem birokrasi pemerintahan daerah yang sesuai dengan kondisi kedaerahan dan karakter penduduknya masing-masing, sehingga akan terwujud suatu manajemen pemerintahan daerah yang berbeda satu sama lain; Meringankan beban tugas pemerintah (pusat)/instansi vertikal dengan memberikan pelimpahan wewenang kepada daerah dengan tetap memperhatikan azas efisiensi dan efektivitas, dan; Mengutamakan kepentingan kabupaten/kota yang dapat menampilkan keunggulan, keistimewaan dan kreativitasnya.

Dukungan argumentasi tentang harapan tersebut juga sebagaimana disebutkan oleh Ryaas Rasyid et. al. (2003: 218-222) yang secara esensial seperti yang disampaikan Djohan (Kartodihardjo, 2004). Ryaas Rasyid et. al. (2003: 218-222) menyebutkan bahwa, era otonomi daerah saat ini, daerah memiliki sejumlah kewenangan, dan kewenangan tersebut merupakan modal dasar yang sangat penting untuk pembangunan daerah yang meliputi: Pemerintah daerah sebagai fasilitator. Disamping fungsi yang lainnya, fungsi Pemerintah Daerah yang sangat esensial adalah memfasilitasi segala bentuk kegiatan di Daerah, terutama dalam bidang perekonomian; Pemerintah Daerah harus kreatif. Pembangunan Daerah berkaitan pula dengan inisiatif lokal, dan untuk berinisiatif diperlukan kreatifitas dan inovasi dari para penyelenggara pemerintahan; Politik lokal yang stabil. Masyarakat dan Pemerintah di daerah

harus menciptakan suasana politik lokal yang kondusif bagi dunia usaha dan pembangunan ekonomi; Pemerintah Daerah harus menjamin keseimbangan berusaha. Ada kecenderungan yang mengkhawatirkan berbagai pihak bahwa Pemerintah Daerah sering kali merusak tatanan yang sudah ada; dan Pemerintah Daerah harus komunikatif dengan LSM/NGO, terutama dalam Bidang Perburuhan dan Lingkungan Hidup. Pemerintah Daerah sekarang dituntut untuk memahami dengan intensif aspirasi yang berkembang dikalangan perburuhan, baik yang menyangkut upah minimum dan jaminan lainnya, hak-hak buruh pada umumnya, perlindungan kepada buruh wanita, ataupun menyangkut keselamatan kerja dan kesehatan kerja.

Argumentasi konseptual tersebut secara normatif dijelaskan dalam Pasa 258 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah”. Lebih lanjut pasal tersebut menjelaskan bahwa “pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional”.

Agar pembangunan dapat dilakukan secara terencana dan terukur serta dapat mencapai tujuan sebagaimana diharapkan maka diperlukan perencanaan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Hughes (2003: 31) “*goal setting techniques/methods appiled by executives as a means of preparing future courses of organizational action*”. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa perencanaan merupakan teknik atau metode yang menguraikan tentang tujuan dari suatu progam yang diterapkan oleh para eksekutip sebagai instrumen untuk

mencapai apa yang diharapkan ke depan dan instrumen tersebut sebagai tindakan yang harus dilakukan organisasi.

Argumentasi yang sama disampaikan oleh UNDP (2009: 7) menjelaskan bahwa *Planning can be defined as the process of setting goals, developing strategies, outlining the implementation arrangements and allocating resources to achieve those goals*. Perencanaan merupakan suatu proses perumusan tujuan, mengembangkan strategi, mengurai landasan operasional implementasi dan mengalokasikan sumberdaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam konteks organisasi sektor publik, Toft (Riyadi dan Baratakusumah, 2004: 287) menggunakan istilah perencanaan strategi formal (*formal strategic planning*). Toft (Riyadi dan Baratakusumah, 2004: 288) menjelaskan bahwa "*Formal strategic planning recognizes the importance of a structured sequence of problem solving steps based on the rational method of the decision making: problem definition and strategic audit, mission statement and goal setting, formulation of strategies (alternatives), evaluation of strategies and selection, implementation, and measurement and control*".

Davidoff dan Reiner (Saragih, 2015: 36) menyebutkan bahwa dalam konsep perencanaan terdapat beberapa karakteristik penting yang terdiri atas: pencapaian tujuan; mempelajari pilihan; orientasi masa depan; bersifat aksi; dan komprehensif. Berbagai penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa, perencanaan merupakan kompas bagi penyelenggara dalam mengimplementasikan rencana.

Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah memerlukan perencanaan. Perencanaan yang dibuat oleh daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang nantinya sebagai landasan dan payung hukum, dan juga

sebagai kompas yang mengarahkan para pelaksana dalam melaksanakan pembangunan daerah. Alexander Abe (2005) dengan konsep perencanaan daerah partisipatifnya menjelaskan bahwa, perencanaan daerah merupakan proses menyusun langkah-langkah yang akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Perencanaan pembangunan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa model yang biasa digunakan. Mangiri (2000) menyebutkan terdapat 9 (sembilan) model atau pendekatan dalam perencanaan pembangunan, yaitu: pendekatan atas-bawah (*top-down*); pendekatan bawah-atas (*bottem-up*); pendekatan obyek; pendekatan sektrol atau bidang; pendekatan gabungan atau campuran; pendekatan komprehensif; pendekatan terpadu; pendekatan pengerutan; penedekatan parsial; dan pendekatan proyek demi proyek.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan perencanaan pembangunan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*), bawah-atas (*bottem up*) dan musrembang.

Kota Tidore Kepulauan dalam perencanaan pembangunan daerahnya, utamanya dalam pembangunan pariwisata menggunakan model perencanaan politis dan teknokratik. Indikasi penggunaan kedua model tersebut terlihat dari:

Pertama, model politis. Model politis yang digunakan Kota Tidore Kepulauan dalam perencanaan pembangunan pariwisata terlihat dari proses perencanaannya. Perencanaan pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh Kota Tidore Kepulauan merupakan pelaksanaan visi dan misi daerah yang telah

dikonsepkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan 2005-2025, dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tidore Kepulauan 2010-2015.

Gambar tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Wahyudi (2006: 7) bahwa, perencanaan pembangunan secara politik melalui pemilihan langsung presiden dan kepala daerah yang menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choic theory of planning*) khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJM. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Kedua, model teknokratik. Perencanaan pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh Kota Tidore Kepulauan dengan menggunakan lembaga perencana daerah (BAPPEDA) dan beberapa instansi pemerintah daerah, serta bekerjasama dengan para akademisi, dan dilakukan secara ilmiah. Namun, peran akademisi hanya sebatas penyusunan naskah akademik.

Wahyudi (2006: 7) menjelaskan bahwa, perencanaan pembangunan teknokratik adalah perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pendekatan teknokratis merupakan

metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Ketiga, proses perencanaan pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak melibatkan masyarakat dan pihak swasta dan pelaku usaha daerah.

Saragih (2015: 66) untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi yang berbasis pada pariwisata tidak diukur berdasarkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan penerimaan daerah dari sektor pariwisata. Akan tetapi, dinilai berdasarkan seberapa besar industri pariwisata dapat mengintegrasikan ekonomi nasional dan daerah, serta seberapa besar industri pariwisata berkontribusi terhadap pembangunan secara menyeluruh terhadap masyarakat daerah. Untuk itu, dalam proses pembangunan pariwisata diperlukan keterlibat seluruh stakeholders daerah (*government, private sektor, dan civil society*). Tanpa ada kerjasama yang baik dan berimbang antara ketiga aktor tersebut maka harapan pembangunan pariwisata daerah tidak akan dapat diwujudkan.

Argumentasi yang sama disampaikan oleh UNESCO (2009: 17) bahwa, salah satu kunci keberhasilan pembangunan pariwisata adalah pentingnya keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan tahapan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat harus dilibatkan mulai pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Masyarakat yang terlibat dalam setiap tahapan pembangunan diharapkan mampu menyampaikan ide dan pemikiran serta kepentingannya. Keberadaan masyarakat harus dijadikan mitra kerja yang setara, terjamin, dan efektif. Kemitraan yang menjamin keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kerangka untuk

mengelola pariwisata yang sesuai dengan visi dan karakter masyarakat setempat.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, pariwisata memiliki kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat daerah. Untuk mencapai hasil yang maksimal dari sektor pariwisata terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, maka oleh Akama dan Kieti (Saragih, 2015: 66) menyebutkan terdapat beberapa strategi yang harus dilakukan, diantaranya adalah pengembangan kemitraan antara sektor publik, swasta, LSM, dan masyarakat lokal.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, keterlibatan stakeholders sangat penting. UNDP (2009: 25) dengan konsep manajemen pembangunan berbasis hasil menjelaskan bahwa partisipasi stakeholders dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu instrumen efektifitas dalam perencanaan. UNDP (2009: 27) menyebutkan stakeholders yang dilibatkan dalam proses perencanaan sebagai berikut: *Office of the Prime Minister, Universities, Main political parties, Religious umbrella organizations, NGO groups, Private sector organizations, Minority group representatives, Youth umbrella organizations, Electoral administrative body, International observer group, Citizens' organizations, Women's organizations, and Informal political leaders.*

Dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi daerah, keterlibatan stakeholders sangat penting dan suatu keharusan sebagaimana dijelaskan oleh EGAT/UP and The Urban Institute (2003: 1), dan UN-HABITAT (2005: 2). Zubaedi (2007: 172) dengan konsep pembangunan berbasis masyarakatnya, menjelaskan bahwa "model pembangunan alternatif menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*),

berparadikma *Bottom Up* dan lokalitas. Pendekatan yang dipakai dalam model pembangunan alternatif adalah pembangunan tingkat lokal, menyatu dengan budaya lokal, bukan memaksakan model dari luar, serta sangat menyertakan partisipasi orang lokal.” Konsep pembangunan lokal dengan memberdayakan masyarakat lokal merupakan sebuah alternatif pembangunan yang kemudian berdampak terhadap kemajuan masyarakat lokal, dan hal inilah yang menjadi harapan dan tujuan pembangunan daerah.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), prasyarat fundamental bagi pencapaian pembangunan adalah keterlibatan publik (masyarakat) sebagaimana dijelaskan oleh Brundtland (Death, 2010) bahwa, pembangunan berkelanjutan membutuhkan sebuah sistem politik yang menjamin partisipasi warga yang efektif di dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut Brundtland (Death, 2010) menyebutkan syarat ini dapat tercapai dengan baik jika: mendesentralisasikan manajemen sumber-sumber daya kepada masyarakat lokal; memberikan hak suara yang efektif kepada masyarakat lokal; mempromosikan prakarsa warga negara dan pemberdayaan organisasi masyarakat; dan penguatan demokrasi lokal.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Brundtland di atas, World Bank (Death, 2010) menyatakan bahwa “salah satu persyaratan fundamental bagi pencapaian pembangunan yang berkelanjutan adalah partisipasi publik yang luas dalam pengambilan keputusan”. Partisipasi publik yang luas dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dalam proses pembangunan daerah tersebut World Bank (Death, 2010) menyebutkan secara rigis tentang pihak-pihak atau “kelompok utama” yang harus terlibat dalam proses tersebut yaitu: perempuan, anak-anak, warga pribumi,

LSM, pemerintah setempat, serikat dagang, bisnis, ilmuan, dan petani. Dan semua kelompok utama tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta mempunyai akses tanpa ada diskriminasi politik, ekonomi, dan sosial.

7.2.2 Implikasi Praktis

Berikut adalah implikasi praktis sebagai rekomendasi yang merupakan bagian dari hasil penelitian ini.

1. Penyiapan objek dan daya tarik destinasi pariwisata dalam kerangka perencanaan pembangunan kepariwisataannya diperlukan keterlibatan seluruh stakeholders daerah. Stakeholders daerah yang harus dilibatkan dalam proses tersebut meliputi: pemerintah daerah (seluruh instansi dan kantor yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan); swasta dan pelaku usaha pariwisata; dan sosial kemasyarakatan. Keterlibatan secara totalitas seluruh stakeholders daerah tersebut dalam upaya untuk menyiapkan seluruh objek dan daya tarik wisata di daerah destinasi wisata yang meliputi: penyiapan objek wisata, objek wisata unggulan daerah, kesiapan masyarakat dan lingkungan, dan tata laksana infrastruktur destinasi wisata.
2. Penyiapan masyarakat dan penguatan sumberdaya manusia pada sektor kepariwisataan perlu dilakukan, karena dalam pembangunan kepariwisataan memerlukan ketersediaan sumberdaya manusia yang mempunyai skill serta kemampuan manajemen yang baik pada bidang kepariwisataan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengembangan sumberdaya manusia oleh pemerintah daerah secara terencana dan terukur, dengan pendirian lembaga pendidikan kejuruan kepariwisataan, pemberian bantuan lanjut studi pada bidang kepariwisataan, dan masukan materi kebudayaan dan pariwisata ke dalam kurikulum lembaga pendidikan pada semua jenjang.

3. Dalam upaya memberikan kemudahan, kamanan, kenyamanan kepada wisatawan dalam menikmati perjalanan dan beraktifitas dalam berwisatanya, maka diperlukan perencanaan pembangunan kepariwisataan secara umum dengan penataan ruang fasilitas infrastruktur pendukung dan penunjang pariwisata. Untuk itu, diperlukan rencana tata ruang pembangunan fasilitas infrastruktur pendukung dan penunjang pariwisata. Agar dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah disusun dan konsepkan secara baik dan ilmiah maka diperlukan keterlibatan para ahli dan akademisi. Untuk efektifitas keterlibatan ahli dan akademisi dalam setiap tahapan dan proses pembangunan daerah, maka diperlukan ruang keterlibatan yang disediakan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
4. Ketersedian amenities atau fasilitas penunjang dan pendukung wisata berupa sarana akomodasi pariwisata seperti hotel dan penginapan, restoran dan rumah makan, serta sarana pariwisata seperti biro perjalanan. Untuk itu, pemerintah daerah sebagai regulator memberikan kemudahan izin usaha dan investasi untuk mendorong investor dan pelaku usaha untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha dalam penyediaan fasilitas penunjang dan pendukung pariwisata berupa hotel, peninginan, restoran dan rumah makan, serta jasa biro perjalanan.
5. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, termasuk pariwisata memerlukan fasilitas saran dan prasarana transportasi. Pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan dengan baik Pemerintah (pusata dan daerah) menyediakan infrstruktur transportasi: jalan, jembatan, terminal, banda, dan pelabuhan. Selanjutnya pemerintah mendorong dan memfasilitas pihak swasta dan masyarakat menyediakan dan mengembangkan usaha sarana

dan modal transportasi untuk mobilisasi dan aktifitas perekonomian daerah, termasuk memberikan kemudahan untuk mengakses destinasi dan objek wisata.

6. Dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah destinasi wisata, maka diperlukan promosi objek dan destinasi pariwisata. Untuk melakukan hal tersebut, diperlukan kerjasama dan partisipasi dari pelaku usaha pariwisata yang bergerak pada bidang traveling. Untuk itu, pemerintah harus mendorong dan memberikan kemudahan perizinan kepada pihak swasta dan pelaku usaha mengembangkan usaha traveling sekaligus sebagai media promosi objek dan destinasi wisata daerah.
7. Tujuan pembangunan daerah adalah dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan dan menumbuhkan perekonomian daerah, serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai itu, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa melibatkan pihak swasta dan pelaku usaha, serta masyarakat (baik individual maupun institusional). Oleh karena itu, ruang partisipasi dan keterlibatan pihak swasta dan pelaku usaha, serta masyarakat sebagai stakeholders pembangunan daerah harus disediakan dan difasilitasi. Pemerintah sebagai regulator memberikan kemudahan perizinan kepada pihak swasta dan masyarakat untuk menyediakan dan mengembangkan berbagai fasilitas umum.
8. Dalam pembangunan kepariwisataan, pariwisata adalah industri yang kompleks. Oleh karena itu, keterlibatan semua stakeholders dan pembagian peran antara pemerintah, swasta, pelaku usaha dan masyarakat dalam pembangunan pariwisata sangat diperlukan. Untuk mendorong keterlibatan dan peran stakeholders dalam pembangunan destinasi pariwisata secara

efektif maka diperlukan forum koordinasi pengembangan destinasi pariwisata. Melalui media forum koordinasi pengembangan destinasi pariwisata tersebut, seluruh stakeholders pariwisata membangun jaringan dan berkoordinasi untuk melakukan perencanaan pengembangan, promosi dan pemasaran destinasi pariwisata.